Bursa Aset Kripto Diharapkan Bantu Ekonomi Indonesia

Tanggal	: Jum'at , 25 Juni 2021
Media	: Investor Daily
Halaman	: 16
Wartawan	: Lov
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Eko Listiyanto *(Wakil Direktur Indef)*, Nur Komaria *(Peneliti INDEF)*
Rubrik	: Markets & Coporate
Topik	: Kripto

Bursa Aset Kripto Diharapkan Bantu Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Bursa khusus aset kripto yang rencananya diluncurkan pada akhir tahun ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia dinilai belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi, beda halnya dengan obligasi dan saham yang sudah menunjukkan kontribusinya ke negara. Hal ini termasuk dari sisi perpajakan.

"Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada, kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa? Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian," katanya dalam diskusi publik "*Plus Minus Investasi Aset Kripto*", Kamis (24/6).

Meski begitu, Eko mendukung langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sedang mempersiapkan bursa kripto. Apalagi, ekosistem kripto di Indonesia yang terdiri atas empat sektor, yakni 13 pedagang aset kritpo (*exchange*), lembaga kliring, ekosistem depository atau tempat penyimpanan aset kripto, dan bursa telah menyatakan kesiapannya.

Ditambah, potensi aset-aset kripto (*crypto asset*) sebagai instrumen investasi yang mumpuni di Indonesia dinilai sangat besar. Hingga April 2021, Bappebti mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 126 triliun. Bappebti juga mencatat jumlah investor aktif di aset kripto per Januari-Maret 2021 mencapai 4,2 juta orang.

Peneliti INDEF Nur Komaria juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan bursa kripto, sehingga membuat uang kripto legal untuk diperdagangkan. Selanjutnya, dia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mengingat, Bitcoin dan uang kripto banyak digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme," ucap dia.

Namun fluktuasi harga sejumlah mata uang kripto ini tetap harus diwaspadai oleh para investor. Bagi masyarakat yang ingin mencoba investasi di uang kripto, Nur menyarankan, untuk terus melihat kapitalisasi pasar dan valuasi dari perusahaan digital pencipta mata uang kripto yang diincar.

"Bagi investor yang tidak siap dengan volatilitas dan terutama yang tidak memiliki literasi keuangan, dapat berdampak kurang baik. Industri keuangan juga harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat," tegas dia. **(lov)**